

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ialah aktivitas yang dikerjakan negara atau daerah untuk mendorong pendapatan ekonomi demi tujuan kesejahteraan publik. Pembangunan bersifat luas yang merangkumi beraneka macam bagian kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, politik, undang-undang, dan sosial-budaya (Arsyad, 2014). Pembangunan memiliki tujuan untuk mendorong kesejahteraan publik menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan yang dilakukan di berbagai daerah, selalu diiringi oleh permasalahan ketimpangan. Ketimpangan yang umumnya terjadi adalah ketimpangan ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi karena pola pertumbuhan yang terjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari pertumbuhan penduduk ataupun terdapat perbedaan pola perekonomian.

Perbedaan Sumber Daya Alam dan letak geografis yang dipunyai setiap daerah juga menjadi sebab adanya ketimpangan terjadi. Akibat dari perbedaan tersebut kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi berbeda. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara memperkuat pembangunan daerah. Hal terpenting dalam pembangunan daerah adalah bahwa daerah tersebut mampu mengidentifikasi setiap sektor-sektor potensial yang dimilikinya, kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi

daerah. Perencanaan pembangunan daerah mempunyai peranan yang sangat besar sebagai alat untuk mendorong proses pembangunan lebih cepat dan terarah. Pembangunan daerah berpedoman pada prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya nasional. Sehingga menciptakan peluang peningkatan demokrasi dan efektifitas kinerja ekonomi daerah (Adisasmita, 2011:3).

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah sehingga memungkinkan daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah (Kharisma, 2013).

Menurut Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan otonomi dibiayai oleh tiga pendapatan daerah, yaitu: Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah digunakan dalam upaya membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenangnya agar dapat meraih tujuan pemberian otonomi kepala daerah, untuk meningkatkan layanan, juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberiaan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri diharapkan dapat

memperkecil ketimpangan dalam pendanaan juga mendorong dan meningkatkan pembangunan ekonomi demi taraf hidup masyarakat lebih tinggi.

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah dan pembangunan daerah dapat terwujud apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Artinya pemerintah daerah haruslah independen dengan cara menggali sebanyak mungkin sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi, dan lainnya. Pada kenyataan setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam membiayai kegiatan ekonominya, sehingga daerah dengan PAD rendah akan kesulitan dalam membiayai kegiatan ekonominya. Pemerintah pusat mengalokasikan dana dari APBN ke daerah yang disebut dengan Pendapatan Transfer untuk membantu otonomi daerah dalam membiayai perekonomiannya. Pendapatan lain-lain yang sah digunakan pemerintah daerah untuk menambah pendapatan daerahnya selain dari PAD dan Pendapatan Transfer.

Pemberiaan otonomi daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila realisasi tujuan pembangunan telah dilaksanakan secara tepat, komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi (Agusalim, 2016).

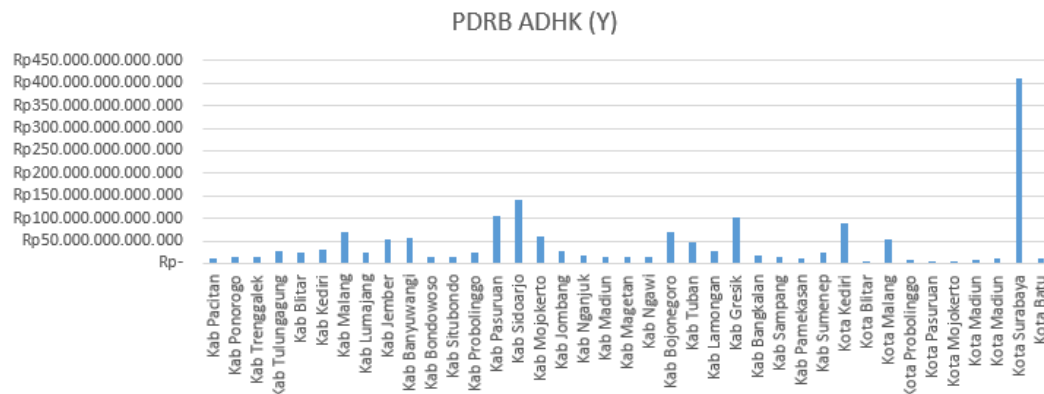
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perubahan dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah dari tahun ke tahun. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Secara teoritis dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan suatu masyarakat, semakin baik tingkat kesejahteraannya. (Iswanto, 2015). Pada dasarnya peningkatan PDRB dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki daerah yang terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Secara lebih rinci diuraikan dalam pemilikan faktor produksi (modal, tenaga kerja, tanah, dan skill). Semakin besar faktor produksi tersebut, akan semakin besar output yang diperoleh yang pada gilirannya akan meningkatkan PDRB (Tan, 2013).

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product) merupakan tolak ukur dalam melihat keadaan ekonomi sebuah provinsi, kabupaten atau kota. Dalam menentukan keberhasilan sumber daya ekonomi, perubahan ekonomi, dan struktur ekonomi suatu daerah digunakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Sementara itu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun ataupun pertumbuhan ekonomi yang tidak

dicampuri oleh faktor harga maka menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB bisa juga diperlukan untuk menentukan perbedaan harga dengan memperhitungkan deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Di mana indeks harga implisit adalah perbandingan antara PDRB ADHB dan PDRB ADHK (BPS, 2020).

Jawa Timur merupakan provinsi di Indonesia yang ada di pulau Jawa yang terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota yang beribu kota di Surabaya yang luasnya adalah 47.922 km² dan populasi 39,698,631 orang pada 2019. Perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya pada setiap daerah menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Distribusi sumber daya yang tidak sama dan pertumbuhan pusat perdagangan dan perindustrian tertumpu hanya di beberapa tempat. Ini berarti bahwa pembangunan ekonomi daerah yang mempunyai kelebihan di satu daerah lebih baik daripada daerah lain, hal itu menjadikan tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antara daerah semakin tinggi (Fitriyah dan Rachmawati, 2013:2).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditahun 2019 adalah 5,52 persen, sementara nasional adalah 5,02 persen. Dibuktikan dari hasil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur yang mampu menyumbang 14,92 persen dari PDB nasional. PDRB di Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir sentiasa meningkat. Angka PDRB ADHK 2010 Jawa Timur, selama lima tahun terakhir masing-masing adalah 1.340.564 miliar rupiah (2015), 1.421.041 miliar rupiah (2016), 1.502.443 miliar rupiah (2017), 1.585.911 miliar rupiah (2018), dan 1.650.143 miliar rupiah (2019)



Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (Jawa Timur dalam Angka 2020)

Gambar grafik PDRB tersebut dapat diketahui pusat perekonomian Jawa Timur ada di Kota Surabaya dimana PDRB Surabaya pada tahun 2019 sebesar 410 triliun rupiah yang merupakan 24% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 1.650 triliun rupiah. PDRB sejumlah itu lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah PDRB 10 kabupaten di Jawa Timur, yaitu Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi Sementara PDRB terendah ada pada Kota Blitar dengan PDRB 4,8 triliun rupiah. Hal ini menandakan bahwa Kota Surabaya mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dibanding kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur.

Ada fenomena langka yang jarang terjadi yaitu ada daerah di Jawa Timur yang mempunyai PDRB tinggi tetapi tidak terletak di kawasan perindustrian (Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik dan Pasuruan), daerah tersebut adalah Kota Kediri dengan total PDRB pada tahun 2019 sebanyak 90

triliun. Fakta bahwa Kota Kediri memiliki PDRB yang tinggi belum memberi pengaruh pada daerah sekitarnya, misal pada Kabupaten Tulungagung yang memiliki PDRB pada tahun 2019 sebanyak 27 triliun, Kota Blitar mendapatkan PDRB 25 triliun di tahun yang sama, dan Trenggalek yang hanya mempunyai PDRB 12 triliun pada tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di Jawa Timur. Hal itu akan menyebabkan adanya daerah kurang maju atau keterbelakang dengan daerah yang maju. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti pemerataan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antar daerah. Pemerataan ekonomi dibutuhkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Fitrah, 2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat ketimpangan yang terjadi. Pada penelitian Penelitian (Azizi, 2018) diperoleh hasil yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh negatif terhadap ketimpangan regional. Memiliki arti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa mengurangi ketimpangan regional. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat terjadi apabila terdapat pengelolaan keuangan daerah yang baik. Sesuai dengan penelitian (Ardian, Aris & Zainal, 2018) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jika PAD yang terealisasi mengalami peningkatan maka PDRB di kawasan itu juga akan meningkat. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga berpengaruh positif terhadap PDRB.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas yang telah dipaparkan, peneliti terdorong mengambil penelitian “Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar daerah di Jawa Timur melalui Pertumbuhan Ekonomi?
2. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar daerah di Jawa Timur melalui Pertumbuhan Ekonomi?
3. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Lain-lain yang Sah terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar daerah di Jawa Timur melalui Pertumbuhan Ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar daerah di Jawa Timur melalui Pertumbuhan Ekonomi.
2. Menganalisis pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar daerah di Jawa Timur melalui Pertumbuhan Ekonomi.
3. Menganalisis pengaruh Pendapatan Lain-lain yang Sah terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antar daerah di Jawa Timur melalui Pertumbuhan Ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Ilmu Ekonomi baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan perencanaan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Penulis dapat memberikan masukan ilmu serta pengembangan teori bagi Akuntansi Sektor Publik dibidang pengelolaan keuangan daerah.
3. Penelitian ini dapat berguna sebagai untuk referensi maupun tambahan pengetahuan terkait pembangunan regional untuk memaksimalkan PAD, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi regional serta menurunkan ketimpangan ekonomi antar daerah di Jawa

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pemerintah daerah dapat menggunakan ini sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam upaya pembangunan daerah.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat menggunakan penelitian ini untuk melaksanakan fungsinya dalam penyusunan kebijakan teknik di bidang keuangan daerah.